

Kepentingan Ekonomi Indonesia melalui Perjanjian Indonesia – Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)

Oxanna Jean Wa'Uina¹, Novriest Uumbu W. Nau², Roberto Octavianus Cornelis Seba³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
372020023@student.uksw.edu ¹, novriest.umbu@uksw.edu, robert.seba@uksw.edu

3

ABSTRACT

Indonesia and the United Arab Emirates have maintained a harmonious bilateral relationship since the establishment of diplomatic relations in 1976. In the economic sector, dynamics relationship between the two countries reached a peak with the agreement of the comprehensive IUAE-CEPA. Indonesia subsequently leveraged this cooperation as an implementation of economic diplomacy to fulfill its national economic agenda. Therefore, this study aims to understand Indonesia's economic interests through the Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). The author uses the theory of liberalism and the concept of national interest as analytical tools. The type of research conducted is qualitative research using descriptive methods. The author also collects data and information through literature studies, then summarizes and analyzes this data using data reduction techniques to draw conclusions. The results of the study indicate that IUAE-CEPA provides significant opportunities to accelerate the achievement of Indonesia's economic interests by obtaining a trade surplus through the utilization of non-oil and gas sectors, increasing investment commitments, implementing export market diversification policies to the Middle East region, and the prospects for developing its halal economic sector.

Keywords: Economic Interest, IUAE-CEPA, Trade Surplus, Islamic Economy

ABSTRAK

Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menjalin hubungan bilateral yang harmonis sejak peresmian hubungan diplomatiknya pada tahun 1976. Dalam bidang ekonomi, dinamika hubungan kedua negara mencapai puncak saat disepakatinya perjanjian komprehensif IUAE-CEPA. Indonesia selanjutnya memanfaatkan kerjasama ini sebagai implementasi diplomasi ekonomi untuk memenuhi agenda perekonomian nasionalnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kepentingan ekonomi Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA). Penulis menggunakan teori liberalisme dan konsep kepentingan nasional sebagai pisau analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis juga mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan untuk kemudian merangkum serta menganalisis data tersebut melalui teknik analisis data berupa reduksi untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IUAE-CEPA memberikan peluang yang baik untuk mengakselerasi pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia melalui perolehan surplus perdagangan dengan memanfaatkan sektor unggulan non migas, peningkatan komitmen investasi, penerapan kebijakan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Timur Tengah dan prospek pengembangan sektor ekonomi halalnya.

Kata kunci: Kepentingan Ekonomi, IUAE-CEPA, Surplus Perdagangan, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang secara luas mengacu pada segala bentuk interaksi antara aktor-aktor global yang melintasi batas-batas geografis suatu negara. Kompleksitas kebutuhan masyarakat dalam suatu negara dapat mendorong terciptanya suatu interaksi atau hubungan kerjasama antar negara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya, Indonesia turut melakukan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan negara-negara lain, salah satunya adalah Uni Emirat Arab (UEA). Kedua negara dimasing-masing kawasan yang cukup strategis mempunyai prospektif yang cukup baik jika membentuk suatu hubungan kerjasama, terutama pada sektor ekonomi.

Indonesia sebagai bagian dari negara keanggotaan ASEAN memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Dengan populasi warga negara terbesar di kawasan tersebut, kekuatan ekonomi Indonesia berada pada pasar domestiknya yang cukup besar. Setidaknya menurut laporan IMF pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat satu ekonomi di Asia Tenggara dengan PDB mencapai USD1,32 miliar atau sekitar 35% dari total PDB ASEAN (LSPR, 2023). Indonesia juga masuk dalam peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan nilai PDB, sehingga menjadikannya sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang tergabung dalam forum kerjasama ekonomi G20. Dengan posisi strategis Indonesia di kawasan dalam sektor perekonomian, membuatnya turut menjadi sasaran peluang terhadap investasi dan pasar ekspor oleh negara-negara lain, termasuk oleh negara teluk atau *Gulf Countries Council* (GCC).

Hal ini sejalan dengan kebijakan "*Pivot to Asia*" yang turut dieksplorasi oleh negara-negara teluk di kawasan Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab, dengan melihat potensi perekonomian kawasan Asia yang cukup pesat (Jensen, 2018). Istilah "*Pivot to Asia*" yang pertama kali dimulai pada tahun 2011 oleh Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memperkuat pandangan negara-negara teluk untuk turut menjalin kerjasama yang strategis dengan Asia dan tidak hanya bergantung pada kekuatan geopolitik barat yang pada saat itu sangat mendominasi hubungan internasional. Timur Tengah sebagai kawasan dengan cadangan minyak bumi terbesar dunia, kemudian memanfaatkan strategi ekspor minyak bumi ke kawasan Asia dalam menerapkan kebijakan "*Middle east Pivot to Asia*"-nya. Dalam hubungan perdagangan di kawasan Asia Tenggara, ekspor minyak bumi oleh negara-negara teluk memegang peranan utama hingga mencapai 43% pada tahun 2021. Yang mana perdagangan Uni Emirat Arab mewakili proporsi tertinggi sekitar 48,34% atau sekitar 41,20 miliar dolar AS dibandingkan negara teluk lainnya (Asia House, 2022).

Dengan melihat potensi yang ada, IUAE-CEPA atau *Indonesia – Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* menjadi salah satu bentuk implementasi kerjasama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan UEA. Perjanjian ini mencakup pengaturan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitas perdagangan, kerjasama ekonomi, perdagangan barang dan jasa pemerintah, UMKM,

perdagangan digital, ketentuan hukum dan isu kelembagaan, serta khususnya ekonomi islam. Indonesia melihat IUAE-CEPA sebagai langkah strategis dalam peningkatan ekonomi negara, terutama dalam sektor perdagangan. Dengan penurunan dan penghapusan bertahap pada tarif bea cukai produk Indonesia hingga mencapai 94% sejak kerjasama ini diresmikan, maka memberikan peluang akan terbukanya akses pasar dan peningkatan daya saing produk serta ekspor ke Uni Emirat Arab (Kementrian Perdagangan, n.d.). UEA juga menjadi negara tujuan utama produk non migas Indonesia di kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan jumlah ekspor non migas ke UAE tergolong paling tinggi diantara negara-negara yang berada di kawasan tersebut.

IUAE-CEPA juga menjadi sejarah baru karena menjadi perjanjian ekonomi komprehensif pertama yang memasukkan bab khusus terkait dengan ekonomi islam. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi bagian dalam konsumen produk halal terbesar di dunia dengan mencakup 11,34% dari pengeluaran industri halal global (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Meskipun memiliki pasar domestik halal yang sangat besar, pada kenyataannya tingkat ekspor produk halal Indonesia masih rendah dengan hanya mencakup 3,8% dari total pasar produk halal dunia (CNBC Indonesia, 2022). Sehingga melalui IUAE-CEPA, Indonesia dan Uni Emirat Arab berkomitmen untuk turut bekerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam hal pengakuan terhadap sertifikasi halal dan peningkatan industri halal dunia.

Indonesia secara khusus memandang penting UAE sebagai hub penghubung perdagangan di kawasan Timur Tengah sebagai salah satu target pasar non-tradisionalnya. Bagi Indonesia, kawasan Timur Tengah merupakan kawasan strategis untuk menjadi mitra yang potensial bagi kepentingan Indonesia. Indonesia secara langsung membangun keterikatan budaya yang mengarah pada kesamaan karakter pasar dan sosial dengan negara di kawasan tersebut. Hal ini kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk menyikapi dinamika yang berkembang di kawasan Timur Tengah. Kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah berfokus pada prioritas diplomasi 4 + 1 sebagai bagian dari *strategic plan* Indonesia pada tahun 2020 – 2024, salah satunya diplomasi ekonomi (Badan Startegi Kebijakan Luar Negeri, 2021). Secara khusus dalam bidang ekonomi, ekspansi dan penguatan pasar non-tradisional menjadi salah satu strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kepentingan strategis negara.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia, neraca perdagangan antara Indonesia – UEA mencapai 5,05 miliar dolar AS pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,03 miliar dolar AS yang artinya angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan sekitar 20% jika dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun-tahun sebelumnya (Kementerian Perdagangan Indonesia, 2022). Angka tersebut dinilai sangat prospektif terhadap peningkatan sektor perekonomian Indonesia terutama dengan adanya kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Bagi Indonesia, IUAE-CEPA menjadi perundingan dagang bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan teluk, secara khusus dengan salah satu negara anggota GCC. Sebaliknya, Indonesia juga menjadi mitra

kerjasama ekonomi komprehensif pertama yang dimiliki Uni Emirat Arab di kawasan Asia Tenggara. Melalui adanya perjanjian ini, membuka kembali pintu perdagangan dengan negara yang memiliki potensi akan adanya peningkatan perdagangan maupun investasi secara dua arah. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kepentingan nasional Indonesia di kawasan Timur Tengah, dalam konteks ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi Indonesia melalui suatu kerangka kerjasama ekonomi komprehensif bersama UEA. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat penelitian mengenai “Kepentingan Ekonomi Indonesia melalui Penandatanganan *Indonesia –Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement*”.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Liberalisme

Teori liberalisme terkenal nilai kebebasan individunya. Dalam kerangka ini, liberalisme berpedoman pada beberapa asumsi mendasar. Pertama, ia mengakui rasionalitas dan kebaikan yang melekat pada sifat manusia. Kedua, kaum liberalis mengutamakan kepentingan individu dan juga mengakui potensi keharmonisan kepentingan antar individu. Ketiga, kerja sama dipandang positif oleh kaum liberalis. Terakhir, kaum liberalis percaya bahwa hubungan antar individu melampaui batas-batas negara (Steans, Pettiford, Diez, & El-anis, 2010). Asumsi inti ini membentuk perspektif liberalis, yang memandang hubungan internasional sebagai arena terbuka di mana berbagai aktor dapat dengan bebas berinteraksi dan berkolaborasi demi kemajuan kepentingan bersama.

Dalam bidang ekonomi, liberalisme mengutamakan peranan dan kebutuhan setiap individu dalam suatu regulasi perdagangan atau yang kemudian dikenal dengan konsep pasar. Mekanisme pasar inilah yang digunakan sebagai motor penggerak dalam sistem perekonomian. Pemikiran dasar liberalisme klasik yang berfokus pada bidang ini salah satunya dikembangkan oleh Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom terkenal dari Skotlandia, yang turut menekankan pada individualisme dan kebebasan dalam bidang ekonomi. Perspektif liberalisme klasik ini menganggap jika pasar diperbolehkan berjalan secara bebas tanpa ada intervensi negara dan jika negara dapat membuka perdagangan dengan satu sama lain, maka akan memberikan keuntungan bagi semua pihak dalam jangka panjang (Steans, Pettiford, Diez, & El-anis, 2010). Poin penting dalam pemikiran Smith, diantaranya menekankan adanya persaingan pasar secara bebas, hak milik Swasta, mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah melalui *Invisible Hand* memberikan efisiensi sumber daya, dan individualism ekonomi (Yamin & Haryanto, 2017).

Liberalisme bukan berarti tidak melihat adanya peran negara sama sekali dalam ekonomi. Peran negara dibutuhkan sebagai penyedia kerangka peraturan dan sistem hukum untuk menghindari persaingan tidak sehat antara individu. Adam Smith menyebut dalam bukunya “*Wealth of Nation*” bahwa kunci kemakmuran suatu negara terletak pada produksi dan perdagangan (Yamin & Haryanto, 2017). Dalam ekonomi pasar bebas, setiap negara pada akhirnya akan membentuk suatu ketergantungan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dalam proses

produksi. Konsep pasar bebas dalam teori ini dapat menjelaskan mengenai langkah Indonesia untuk memanfaatkan prinsip-prinsip liberalisme dalam meningkatkan perdagangan bebas dengan negara lain melalui kerangka kerjasama ekonomi komprehensif. CEPA akan mengarah pada perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing dengan mengurangi hambatan perdagangan sehingga memberikan kebebasan individu untuk mengatur dirinya dalam pasar bebas.

Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Konsep kepentingan nasional memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan luar negeri, yang umumnya digunakan dalam dua cara, baik untuk membentuk perilaku politik ataupun sebagai alat analisis terkait kebijakan luar negeri suatu negara. Disaat suatu negara telah menetapkan kepentingan nasionalnya, maka dibentuklah kebijakan luar negeri yang dimaksudkan untuk memajukan kepentingan tersebut dalam sistem internasional. Kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yakni kondisi internal dan kondisi eksternal negara. Dalam bukunya yang berjudul "*War and Change in World politics*", Robert Gilpin menyatakan bahwa konsep kepentingan nasional juga memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ekonomi global. Adanya perubahan dalam perekonomian dunia mengubah kepentingan nasional suatu negara dengan mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan dan mempertahankan kekuatan ekonomi. Kondisi eksternal ini yang kemudian dapat memicu kemungkinan terjadinya konflik atau kerjasama antar negara sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi global yang dinamis (Gilpin, 1981). Perspektif liberalis berpendapat bahwa *national interest* memiliki ciri yang lebih pluralistik dan inklusif, yang mana inti pemikiran ini melihat bahwa kepentingan nasional suatu negara tidak selalu "anarkis" dan bersaing, melainkan juga dapat diintegrasikan dalam suatu kerangka kerjasama internasional. Hal ini juga didukung oleh pandangan tokoh liberalis seperti Adam Smith, yang menyatakan bahwa pada dasarnya kepentingan nasional merupakan akumulasi dari kepentingan pribadi (Burchill, 2005, p. 107). Gagasan inilah yang kemudian dieksplorasi lebih lanjut dalam konsepsi hubungan antar negara.

Konsep Kerjasama Internasional (*International Cooperation*)

Kerjasama internasional merupakan hubungan yang terbentuk antara berbagai aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik pemerintah negara, organisasi internasional, NGO, maupun perusahaan multinasional. Dalam tatanan hubungan internasional, negara sebagai aktor utama masih membutuhkan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga pada umumnya kerjasama internasional yang dilakukan antar negara terbentuk sebagai keberlanjutan dari adanya kesamaan kepentingan. Dengan mengasumsikan pihak yang terlibat kerjasama bertindak secara sengaja demi kepentingannya, maka setiap negara akan memaksimalkan pengaruh yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Abbott & Duncan, 2004). K. J. Holsti dalam skripsi (Sari, 2017) mendefinisikan bahwa kerjasama internasional adalah pertemuan dari dua atau lebih kepentingan yang dipromosikan serta dipenuhi oleh semua pihak yang bersangkutan melalui sebuah

persetujuan atau kebijakan untuk membantu negara itu dalam mencapai kepentingan maupun nilai-nilainya. Dengan menggunakan konsep ini, penulis akan berfokus pada kerjasama dalam bentuk bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Uni Emirat Arab melalui IUAE-CEPA.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan penentuan unit analisis dari penelitian yaitu kepentingan ekonomi Indonesia dan unit amatan penelitian yaitu penandatanganan *Indonesia – Uni Arab Emirates Comprehensive Economy Partnership Agreement*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi-informasi melalui buku, laporan penelitian, karya tulis ilmiah atau sumber kajian lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Penulis memperoleh data dengan membaca, mengolah dan menelaah semua informasi kajian literatur yang sesuai untuk mengulas kepentingan ekonomi Indonesia melalui kerjasama IUAE-CEPA. Sedangkan, Teknik analisis data yang dilakukan dalam hal ini terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan perspektif teori liberalisme dan konsep kepentingan nasional serta konsep kerjasama internasional (Siyoto & Sodik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penandatanganan Kerjasama *Indonesia – Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement*

Setelah pengakuan Indonesia terhadap kemerdekaan Uni Emirat Arab pada tahun 1971, kedua negara sampai pada tahap peresmian hubungan diplomatik yang dilakukan pada tahun 1976. Sejak diresmikannya hubungan diplomatik tersebut, hubungan yang terjalin antara kedua negara terus mengalami peningkatan. Hubungan antar kedua negara menunjukkan kedekatan yang signifikan terutama sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan diikuti oleh meningkatnya intensitas saling balas antara pimpinan kedua negara sejak tahun 2015. Adapun kunjungan Presiden RI pada tahun 2022 ke UEA menjadi inti utama dari pembahasan ini yaitu berkaitan dengan peresmian perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA.

CEPA atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* merupakan skema kerjasama ekonomi yang memiliki cakupan luas yang dilakukan secara bilateral ataupun melalui blok kerjasama ekonomi. Permulaan perundingan perjanjian IUAE-CEPA dimulai dengan putaran pertama yang dilaksanakan pada 2-4 September 2021 untuk membahas 10 kelompok kerja, diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, prosedur kepabeanan dan fasilitas perdagangan, ketentuan asal barang, kerjasama ekonomi mencakup UMKM, kekayaan intelektual, pengadaan barang pemerintah, ketentuan legal dan isu institusional dan ekonomi syariah (Sekretaris Kabinet RI, 2021). Pembahasan lanjutan dari putaran sebelumnya dilakukan di putaran kedua pada 28-30 Oktober 2021 di Dubai. Dalam putaran ketiga pada 1-4 Februari 2022 kedua negara telah menyelesaikan sebagian besar

pembahasan mengenai isu dalam *working groups*. Perjanjian ini mencapai target penyelesaian perundingan pada putaran keempat yang dilaksanakan pada 26 Februari 2022 (Ditjen PPI, 2022). IUAE-CEPA mencapai kesepakatan dan ditandatangani pada 1 Juli 2022 oleh Menteri Perdagangan RI, Zulfikli Hasan dan Menteri Perekonomian PEA, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, di Abu Dhabi. Proses pertukaran naskah ini juga disaksikan oleh pemimpin kedua negara, Presiden RI Joko Widodo dan Presiden PEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. IUAE-CEPA menjadi perjanjian perdagangan bilateral yang memiliki proses perundingan hingga peresmian paling cepat bagi Indonesia, terlihat dari proses negosiasi yang berjalan hanya sebanyak empat putaran dalam kurun waktu kurang lebih sembilan bulan sejak September 2021 hingga Juni 2022 dan pengimplentasian resmi sejak 1 September 2023.

IUAE CEPA menjadi puncak kerjasama antara Indonesia dan UEA dalam bidang ekonomi sebagai salah satu sektor yang turut diprioritaskan karena memiliki peluang yang saling menguntungkan. Terlebih dengan melihat posisi Indonesia dan UEA yang memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi. Indonesia melihat Uni Emirat Arab sebagai mitra strategis di Timur Tengah karena menjadi pintu gerbang dan salah satu penghubung bagi sektor ekonomi Indonesia di kawasan tersebut. Dengan letaknya yang strategis membuat UEA sebagai pusat utama distribusi perdagangan di kawasan. Total perdagangan yang mencapai US\$5,06 miliar telah menjadikan UEA sebagai mitra dagang Indonesia yang paling besar di kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, UEA juga melihat Indonesia sebagai negara yang potensial dan strategis untuk mengakses pasar Asia Tenggara karena posisi kekuatan ekonominya yang paling besar di kawasan tersebut dengan nilai PDB yang mencapai USD1,32 miliar pada tahun 2022 (Kemendag RI, 2021).

Kedua negara juga pada dasarnya memiliki sektor unggulan yang berbeda, Indonesia dengan kekayaan pada sektor non migas dan UEA dalam sektor migas. Yang mana komoditas ekspor utama ke UEA yang dimiliki Indonesia terdiri dari minyak sawit, perhiasan, kendaraan bermotor dan peralatan elektronik beserta turunannya, sedangkan komoditas impor Indonesia dari UEA didominasi oleh produk minyak bumi, aluminium, bahan kimia dan produk setengah jadi dari biji plastik atau baja (Kementrian Luar Negeri RI, 2022). Dengan profil sektor unggulan ekonomi yang berbeda, maka kolaborasi dalam kegiatan perdagangan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan UEA, setidaknya akan selalu memberikan keuntungan bagi perekonomian masing-masing negara pada sektor unggulan yang dimilikinya.

Hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab juga memiliki kedekatan yang didasarkan pada identitas keagamaan. Sebagai negara yang penduduknya sebagian besar beragama Islam, kedua negara dapat membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama yang berlandaskan pada kepentingan agama, termasuk dalam sektor ekonomi. Sejarah hubungan yang berdasarkan pada identitas agama ini telah terlihat sejak kedua negara memutuskan untuk bergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dalam hal ini OKI merupakan organisasi dengan orientasi untuk mengembangkan solidaritas Islam antar negara anggotanya yang telah didirikan sejak tahun 1969 (Minhajuddin, 2023). Dari segi ekonomi, Indonesia dan UEA

kemudian turut memanfaatkan kondisi ini untuk membuat kebijakan yang menggunakan syariat Islam sebagai preferensi. Oleh karena itulah, pengembangan sektor ekonomi Islam menjadi salah satu sektor alternatif yang menjadi kepentingan kedua negara dalam menandatangani IUAE CEPA. Dengan demikian, IUAE-CEPA menjadi salah satu implementasi kerjasama dalam bidang ekonomi yang didasari dengan orientasi untuk memperkuat perekonomian nasional masing-masing negara, sekaligus mendorong kepentingan kedua negara.

IUAE-CEPA dan Peluangnya bagi Indonesia

Penandatanganan IUAE CEPA tidak lepas dari kepentingan yang ingin diperjuangkan Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi. Kerjasama ini menjadi wujud keinginan kedua negara untuk memperkuat hubungan perekonomian dalam menghadapi lingkungan ekonomi global yang dinamis. Dengan mengambil sudut pandang konsep kepentingan nasional, Robert Gilpin juga menyatakan bahwa perubahan dalam ekonomi global dapat mempengaruhi kepentingan nasional suatu negara mengenai kebijakan ekonominya. Melalui perjanjian IUAE CEPA, menjadi upaya Indonesia dan Uni Emirat Arab untuk mencapai suatu hubungan komprehensif yang saling menguntungkan dengan memfasilitasinya dalam bentuk perluasan kegiatan perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi yang berintegrasi pada peningkatan ekonomi nasional.

Dalam sektor perdagangan barang, IUAE CEPA memberikan keuntungan bagi Indonesia dengan adanya pengurangan atau penghapusan total pos tariff dari Uni Emirat Arab sebesar 94% secara bertahap (*entry into force*) atau 7.124 pos tariff dari total 7.581 pos tariff terhadap produk-produk Indonesia, meliputi perhiasan, minyak kelapa sawit, sabun, produk kertas, kendaraan bermotor, produk dari besi dan baja, peralatan listrik dan elektronik, produk kain, batubara dan cengkeh (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Selain itu dalam sektor perdagangan jasa, Uni Emirat Arab telah memiliki komitmen untuk memberikan akses yang lebih besar kepada investor Indonesia dengan memperbolehkan kepemilikan saham asing hingga 75% dalam beberapa subsektor jasa, seperti arsitektur, rekayasa, perencanaan kota, serta FEP yang mencapai 67% dalam sektor jasa konstruksi dan kesehatan. Selanjutnya dalam bidang investasi, IUAE CEPA akan melibatkan kolaborasi dalam pertukaran informasi, penilaian peluang investasi dan upaya promosi khususnya mengenai UKM. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi yang mendukung serta menyediakan fasilitasi dan dukungan melalui SWF (Kementerian Perdagangan, n.d.). Dengan pengurangan hambatan dalam kegiatan ekonomi, maka akan berdampak positif bagi Indonesia dalam hal perluasan akses pasar, investasi maupun daya saing produk lokal di pasar internasional.

Indonesia memandang UEA sebagai negara yang sangat progresif di kawasan Timur Tengah, dengan posisinya sebagai negara pusat distribusi perdagangan di kawasan. Sebagai salah satu negara yang terletak di tepi Teluk Persia, UEA memiliki lokasi yang strategis untuk menghubungkan pasar Asia, Eropa dan Afrika. UEA juga termasuk negara yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi cukup kuat dan stabil di kawasan dengan pertumbuhan GDP per tahun sebesar 3.4% mencapai US\$504.1 juta pada 2023. Ketercapaian ini didorong oleh kebijakan ekonomi UEA yang

progresif, salah satunya melalui pemberlakuan ekonomi terbuka. Sejauh ini, UEA memiliki zona perdagangan khusus atau disebut *free economic zone* terbaik yang ada di kawasan Timur Tengah bahkan secara global. *Free Zone* ini mampu menawarkan insentif berupa 100% kepemilikan asing, pengecualian pajak hingga pemberlakuan tenaga kerja asing tanpa kuota, yang kemudian mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan internasional dan distribusi ekonomi (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). UEA dalam hal ini mampu menarik para pelaku usaha dari luar untuk berdistribusi di negaranya, sehingga membuat UEA berhasil mengembangkan sektor lain (selain migas) untuk mendorong diversifikasi ekonomi di negara tersebut.

Uni Emirat Arab termasuk sebagai sasaran target pasar non-tradisional Indonesia. Dalam konteks distribusi perdagangan, UEA akan berperan sebagai pintu masuk ekspor komoditas ke kawasan Timur Tengah dan penyebaran produk-produk tersebut ke negara disekitarnya, terutama dengan memanfaatkan posisi kota perdagangan dunia seperti Dubai dan Abu Dhabi. Tidak hanya dalam hal perdagangan, Uni Emirat Arab akan membuka jalan bagi Indonesia untuk mengembangkan jaringan mitra usaha untuk mendorong investasi langsung dan kerjasama di berbagai sektor potensial lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Pencapaian kepentingan nasional ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2020 – 2024 yang salah satu prioritasnya berfokus menekankan pada penguatan diplomasi ekonomi. Sehingga IUAE CEPA menjadi salah satu bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia untuk memajukan diplomasi ekonominya dengan memperkuat kerjasama ekonomi strategis Indonesia dengan negara mitra perdagangan non-tradisional.

Peluang kerjasama yang menjadi *highlight* lainnya dari perjanjian IUAE CEPA berkaitan dengan dimasukkannya bab khusus mengenai ekonomi islam, menjadikan IUAE CEPA sebagai satu-satunya kerjasama ekonomi komprehensif yang memuat isu ini. Berdasarkan bab 14 tentang Ekonomi Islam pada perjanjian IUAE CEPA, kedua negara menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sektor ekonomi syariah melalui kerjasama pada aspek pengakuan sertifikasi halal, perdagangan produk halal, ekonomi digital, pengembangan UMKM, perbankan syariah, hingga rencana pembentukan komite ekonomi islam dibawah kerjasama komprehensif ini untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi islam lainnya (Kementerian Perdagangan, n.d.). Pada dasarnya, ekonomi islam merujuk kepada segala kegiatan dan proses ekonomi yang dilandaskan pada prinsip syariah atau ajaran islam berdasarkan Alquran dan sunah, yaitu kegiatan ekonomi yang bebas dari riba, ketidakpastian dan judi, dan atau secara halal. Label halal dalam ini menjadi kunci dan diferensiasi yang membedakan sektor ekonomi biasa dengan ekonomi syariah (Kementerian PPN RI, 2019). Penerapan syarat halal inilah yang kemudian diimplementasikan dalam pengembangan industri halal melalui sertifikasi halal (ramah Muslim).

Berdasarkan laporan *State Global Islamic Economy* tahun 2023, jumlah populasi penduduk muslim di dunia telah melebihi 2 miliar jiwa, yang mana telah mencakup lebih dari 25% populasi global hingga menjadikannya sebagai mayoritas agama yang terbesar kedua setelah agama Kristen. Pertumbuhan populasi penduduk muslim ini diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun kedepan

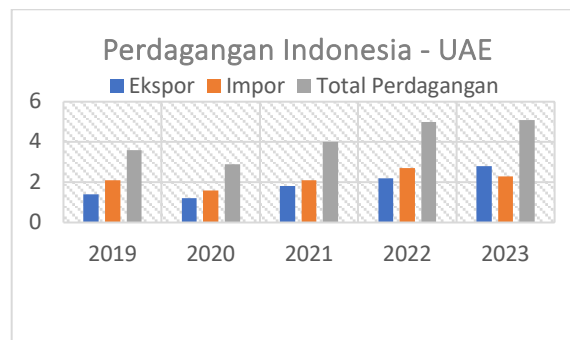
dengan perkiraan akan mencapai 2,8 miliar penduduk pada 2050, mewakili 30% dari populasi dunia. Dengan besarnya angka populasi muslim ini tentunya juga akan berdampak secara langsung terhadap minat dan kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk halal. Hal ini dapat dilihat melalui total pengeluaran oleh masyarakat Muslim terhadap produk halal yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2012 pengeluaran ini mencapai USD 1,62 triliun, hingga di tahun 2022 total pengeluaran terhadap produk halal telah mencapai USD 2,29 triliun. Sehingga menjadikan ekonomi Islam sebagai sektor dengan daya tarik yang baru untuk dieksplor oleh para pelaku bisnis dan negara untuk memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi.

Kepentingan Ekonomi Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama IUAE CEPA

1. Peningkatan Perekonomian melalui Perdagangan dan Investasi

Pada dasarnya, Indonesia dan Uni Emirat Arab merupakan dua negara dengan ekonomi yang cukup besar dimasing-masing kawasan. Sehingga faktor ini juga menjadi pendukung bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan. IUAE CEPA menjadi kemitraan ekonomi yang dapat memfasilitasi peningkatan kegiatan ekonomi antara Indonesia dan UEA dalam perdagangan bebas. Indonesia dapat memanfaatkan segala macam peluang melalui adanya perjanjian ekonomi komprehensif tersebut untuk kepentingan nasionalnya, termasuk peningkatan perekonomian nasional melalui perdagangan dan investasi.

Tabel 1. Perdagangan Indonesia-UEA 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Melalui tabel 1 dapat dilihat bahwa total perdagangan antara Indonesia dan UEA cenderung menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 dimana perekonomian global mengalami krisis akibat adanya pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada perdagangan dunia. Pada tahun 2021 total perdagangan Indonesia-UEA mencapai US\$4,03 miliar, meningkat sebesar 38% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 2,9 miliar US\$. Tahun 2022 sebesar US\$5,05 miliar dan ditahun 2023 mencapai US\$5,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara masih memiliki komitmen yang kuat untuk peningkatan dalam kegiatan perdagangan (ekspor-impor).

Meskipun total perdagangan kedua negara mengalami peningkatan, akan tetapi jika dilihat melalui neraca perdagangan Indonesia ke UEA pada nyatanya

mengalami defisit karena jumlah impor yang lebih besar daripada ekspor. Dalam hal ini, penulis akan lebih berfokus pada perdagangan ditahun 2021 – 2023 dimana tahun tersebut IUAE CEPA telah melalui perundingan dan pengimplementasian oleh kedua negara. Nilai ekspor Indonesia ke UAE ditahun 2021 mencapai US\$1,8 miliar dengan impor sebesar US\$2,1 miliar. Sedangkan pada tahun 2022, ekspor Indonesia sebesar US\$2,2 miliar dengan impor sebesar US\$2,7 miliar. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan ekspor-impor ini adalah perbedaan keunggulan komparatif pada komoditas yang berbeda antara kedua negara, yang mana komoditas ekspor Indonesia unggul dalam sektor non migas, sedangkan komoditas unggul UEA berada pada sektor migas.

Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia – UEA (US\$)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
EKSPOR	1,459.3	1,471.2	1,244.0	1,894.3	2,297.1
Migas	1,7	3,2	3,9	28,1	2,2
Non Migas	1,457.7	1,468.0	1,240.1	1,866.2	2,294.9
IMPOR	1,862.0	2,183.7	1,683.0	2,143.0	2,760.5
Migas	1,137.4	1,341.1	1,133.3	1,377.0	1,899.3
Non Migas	724,6	842,6	549,7	766	861,1
NERACA PERDAGANGAN	-402,7	-712,4	-439	-248,7	-463,3
Migas	-1,1357	-1,337	-1,129	-1,349	-1,897
Non migas	733,1	625,5	690,4	1100,2	1433,7

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Indonesia menjadi negara yang masih didominasi oleh UEA dalam jumlah impor migas yang lebih besar daripada ekspor, sehingga kinerja neraca perdagangan Indonesia cenderung mengalami tekanan akibat defisit perdagangan migas. Meskipun neraca perdagangan total mengalami defisit, akan tetapi trend ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab dalam sektor non migas selalu berada dalam kondisi surplus seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas non migas Indonesia menjadi sektor yang dapat bersaing dan harus dimaksimalisasi di pasar Uni Emirat Arab. Peningkatan nilai ekspor adalah target yang perlu dilakukan Indonesia untuk memperbaiki neraca perdagangan dan mencapai surplus perdagangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kerjasama dalam bidang ekonomi IUAE CEPA dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan perdagangannya melalui kebijakan eliminasi hambatan non-tarif dan pembukaan akses pasar ke UEA untuk meningkatkan akses pasar dan daya saing produk Indonesia.

Sebagai optimalisasi peluang dari adanya IUAE CEPA, Kementerian Perdagangan RI kemudian telah menerbitkan 2 Peraturan Menteri Perdagangan yaitu Permendag No 28 Tahun 2023 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan

Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Permendag No. 29 Tahun 2023 tentang Penerapan Kuota Tingkat untuk Impor Barang Tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Indonesia – PEA (Kemendag RI, 2023). Dengan adanya peraturan ini maka dapat memfasilitasi perdagangan (ekspor-impor) kedua negara melalui implementasi SKA dan TRQ. Akses yang baik terhadap kuota SKA (Surat Ketentuan Asal) serta TRQ (*Tariff Rate Quota*) akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor ke negara mitra karena pengurangan biaya impor dan tarif bea masuk.

Neraca perdagangan Indonesia ke Uni Emirat Arab kemudian menunjukkan surplus pada tahun 2023 seperti pada gambar 1, yang mana dipengaruhi oleh adanya peningkatan ekspor pada sektor non migas yang mencapai US\$2,8 miliar. Peningkatan ini terjadi pasca perjanjian IUAE CEPA diimplementasikan. Pada November 2023 terdapat beberapa produk non migas Indonesia yang mengalami peningkatan ekspor, antara lain HS15 (lemak dan minyak hewani/nabati), HS85 (mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya), HS87 (kendaraan dan bagiannya) serta HS48 (kertas/karton dan turunannya) (Kemendag RI, 2023). Data ini membuktikan bahwa pengurangan hambatan perdagangan memberikan dampak yang positif bagi ekspor Indonesia untuk mencapai surplus perdagangan dengan UAE, yang pada gilirannya dapat mengakselerasi perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perjanjian IUAE CEPA juga akan menjadi kerjasama strategis untuk memfasilitasi dan mendorong potensi investasi asing antara kedua negara. Apabila melihat realisasi investasi pada tahun 2023, investasi Indonesia lebih banyak didominasi oleh penanaman modal asing (PMA) yang mencakup 52,4% atau sebesar Rp 744,0 triliun, sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai 47,6% atau sebesar Rp 674,9 triliun (Menpan RI, 2024). Semakin besar nilai PMA yang masuk ke Indonesia, maka akan berdampak baik pada peningkatan ekonomi nasional. Indonesia meyakini bahwa IUAE-CEPA akan dapat menciptakan peluang yang lebih stabil dalam menarik investasi asing dari UEA ke pasar Indonesia. Berdasarkan data BKPM, nilai PMA UEA ke Indonesia pada 2021 sebesar US\$ 16,149 juta dengan total proyek 77 buah. Selanjutnya tahun 2022 sebesar US\$ 22,883 juta dengan total 146 proyek dan tahun 2023 sebesar US\$ 68,858 juta dengan total 282 proyek. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan dengan total kumulasi nilai PMA UEA ke Indonesia dari tahun 2021 – 2023 mencapai US\$ 107,890 juta dengan total sebanyak 505 proyek (Kemendag RI, 2023). Dengan angka ini, UEA bahkan menjadi negara yang mendominasi nilai investasi ke Indonesia jika dibandingkan negara lain di kawasan Timur Tengah.

Menurut data terakhir pada 2021, Uni Emirat Arab telah memiliki komitmen investasi yang mencapai hampir US\$45 miliar atau sekitar Rp 636 triliun yang bergerak pada berbagai sektor di Indonesia. Dengan rincian pengelolaan terhadap US\$26,6 miliar komitmen investasi akan dikelola oleh BKPM dan sisanya sebesar US\$18 miliar akan dikelola oleh INA (*Indonesia Investment Authority*) selaku lembaga SWF nasional. Komitmen investasi ini meliputi pembangunan sektor telekomunikasi,

minyak, gas, biothermal hingga infrastruktur, termasuk menargetkan proyek pembangunan IKN di Indonesia (CNN Indonesia, 2021). Besarnya nilai komitmen investasi tersebut menunjukkan bagaimana potensinya UEA sebagai mitra strategis Indonesia dalam bidang investasi. Sehingga penting bagi Indonesia untuk mencapai target menindaklanjuti agar komitmen tersebut dapat terealisasi secara sepenuhnya.

2. Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor Indonesia ke Pasar Non-Tradisional

Diversifikasi pasar ekspor merupakan salah satu implementasi diplomasi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan nilai perekonomian negara melalui kegiatan perdagangan dengan negara yang dianggap potensial. Uni Emirat Arab menjadi salah satu target ekspansi pasar oleh Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya terhadap pasar non tradisional sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah. Pasar non tradisional dalam hal ini merujuk kepada negara atau kawasan yang mempunyai pasar yang potensial bagi Indonesia tapi belum terjalin secara maksimal, meskipun hubungan dengan beberapa negara telah terjalin sejak lama, seperti negara-negara yang berada di kawasan Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan hingga kawasan Pasifik (Nurhafizhah & Hirawan, 2021). Kementerian Perdagangan Indonesia telah menetapkan Uni Emirat Arab sebagai pintu masuk ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah. UEA memiliki posisi yang strategis sebagai pusat dan jalur perdagangan dunia, yang mana tidak hanya sebagai hub perdagangan di kawasan Timur Tengah saja, namun juga secara tidak langsung terhadap negara-negara di kawasan Teluk, Afrika dan Eropa. Dengan posisi tersebut, Indonesia memandang penting peran UEA sebagai pusat impor dan re-ekspor produk Indonesia ke berbagai negara, khususnya mitra dagang non-tradisional.

Dalam hal ini khususnya berkaitan dengan ekspor komoditi unggulan Indonesia, yaitu sektor non migas. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia, Uni Emirat Arab berada pada peringkat 19 sebagai negara ekspor non migas Indonesia secara keseluruhan dan berada pada peringkat ke 1 terhadap ekspor ke kawasan Timur Tengah (Kemendag RI, 2023). Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa ekspor non migas Indonesia yang selalu dalam keadaan surplus, seperti yang telah disebutkan pada subjudul sebelumnya. Selain itu jika dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki GDP per kapita US\$4.788, Uni Emirat Arab memiliki angka GDP per kapita yang lebih tinggi hingga mencapai US\$ 58.708 pada tahun 2022 (World Bank, 2022). Melalui angka tersebut maka dapat menunjukkan bahwa UEA memiliki tingkat pasar konsumen yang besar. Berkenaan dengan itu, Indonesia dapat memanfaatkan peluang pasar yang besar tersebut untuk meningkatkan ekspornya ke Uni Emirat Arab, terutama dalam sektor non migas.

Indonesia dan Uni Emirat Arab telah memiliki hubungan diplomatik yang berlangsung sejak lama, sehingga faktor ini jugalah yang dapat menjadi kesempatan Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonominya ke UEA, khususnya dalam memasuki pasar Timur Tengah. Realisasi kerjasama ini terutama dapat dilihat melalui pengimplementasian kerjasama ekonomi komprehensif IUAE CEPA oleh kedua negara. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah Indonesia yang terus berupaya proaktif dalam mendorong kepentingan ekonomi nasional dan menciptakan peluang pasar untuk menunjang para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan.

Selain itu bagi Indonesia, kerjasama IUAE CEPA merupakan kemitraan ekonomi komprehensif pertama yang dijalin dengan negara di kawasan Timur Tengah. Dengan segala kebijakan perdagangan yang timbul pasca penerapan IUAE CEPA, maka memberikan keuntungan dengan mengurangi hambatan dan kendala ekspor Indonesia dalam memasuki pasar UEA. Sehingga melalui perjanjian ini diharapkan akan menghasilkan nilai yang strategis dalam meningkatkan akses pasar dan daya saing terhadap produk-produk ekspor Indonesia ke pasar *emerging* yang lebih luas, seperti Afrika dan Timur Tengah.

3. Prospek terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia

Ekonomi islam menjadi fokus diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara, termasuk oleh negara dengan mayoritas non-muslim. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi islamnya secara global. Salah satunya didukung oleh faktor demografi Indonesia yang besar, yang mana menurut data tahun 2020 populasi muslimnya sendiri mencakup 87% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 229 juta jiwa dari 273 juta total penduduk yang ada (Fathoni & Syahputri, 2020). Jumlah ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim yang paling besar di dunia. Akan tetapi dengan keunggulan demografi dan pasar halal yang besar, tidak menjamin Indonesia menjadi pemain utama dalam industri halal. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan konsumsi masyarakatnya, Indonesia masih sangat bergantung dengan impor produk-produk halal dari negara lain. Hal ini menjadikan Indonesia hanya sebagai negara konsumen terbesar dan pasar untuk produk halal. Berdasarkan data tahun 2018, total konsumsi produk halal yang dihabiskan oleh Indonesia mencapai lebih dari US\$200 miliar atau setara dengan 10% dari pangsa produk halal global. Selain itu dalam hal ekspor, tingkat kontribusi Indonesia terbilang masih sangat rendah dalam pasar halal dunia dengan hanya berkisar 3,8% dari total *spending* industri halal dunia (CNBC Indonesia, 2019). Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia sebenarnya masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi demografi penduduk muslim dan sektor ekonomi islam yang dimilikinya.

Berdasarkan data *State of Islamic Global Economy* (2023), Indonesia masih berada pada peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi dalam kategori Top 15 negara dengan indikator ekonomi islam secara global. Selain itu dari keenam sektor dalam industri halal, Indonesia menempati posisi ke-7 dalam keuangan syariah, posisi ke-2 dalam makanan halal, posisi ke-3 terkait dengan *modest fashion*, posisi ke-5 pada kosmetik dan obat-obatan serta posisi ke-6 untuk *media and recreation*. Adapun dalam sektor *muslim friendly travel*, Indonesia masih belum mampu masuk dalam peringkat sepuluh besar diantara negara-negara lainnya (Dinar Standard, 2023). Menurut laporan *Global Muslim Travel Index* pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal yang terbaik secara global, dengan peringkat setelahnya secara berurutan diikuti oleh negara Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sehingga menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengembangkan sektor pariwisatanya, terutama dalam wisata berbasis halal dengan menarik minat wisatawan asing khususnya wisatawan muslim

untuk berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi, performa Indonesia dalam mengakomodasi aspek-aspek pendukung dalam pariwisata berbasis halal masih belum maksimal, seperti dalam segi regulasi, infrastruktur hingga sertifikasi halal.

Dengan potensi yang ada Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, sehingga penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dalam produksi dan perkembangan ekonomi Islam terutama dalam industri halal dunia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia melalui skema *Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024* untuk mencapai visi “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia” (Kementerian PPN RI, 2019). Peningkatan skala ekonomi syariah Indonesia melalui penguatan rantai nilai halal menjadi target yang ingin dicapai dalam *masterplan* ini dengan fokus utama yaitu pengembangan kawasan hub halal, sertifikasi halal dan kerjasama internasional. Pengimplementasian IUAE-CEPA menjadi salah satu peluang untuk mendorong pencapaian target tersebut karena menjadi kemitraan ekonomi satu-satunya yang mencakup isu tentang ekonomi Islam. Indonesia dan UEA memiliki kesamaan karakter sebagai negara dengan mayoritas muslim yang besar. Selain itu, kedua negara juga menjadi bagian dari OKI sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Islam dengan mengedepankan solidaritas Islam dalam kancah internasional. Faktor ini jugalah yang memungkinkan kedua negara untuk berkomitmen pada perkembangan ekonomi syariah secara global.

UEA menjadi pasar yang dapat dituju untuk meningkatkan penyebaran terhadap produk halal Indonesia dengan posisinya sebagai pusat hub perdagangan dunia. Nilai ekspor produk halal memainkan peran penting sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan peringkat ekonomi syariah di kancah global. Potensi Indonesia sebagai pemain dalam industri halal dapat dibuktikan melalui peringkat Indonesia sebagai eksportir produk halal terbesar ke-8 secara khusus ke negara-negara anggota OKI dengan mencapai US\$13,38 miliar pada tahun 2022. Yang mana diantara negara anggota OKI lainnya, hanya Indonesia dan Turki yang berhasil masuk dalam top 10 negara eksportir untuk semua kategori produk halal. Sedangkan negara anggota OKI yang menjadi importir produk halal terbesar didominasi oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam hal ini Uni Emirat Arab berada diperingkat pertama dengan nilai mencapai US\$32,21 miliar pada tahun 2022 (Dinar Standard, 2023). Data tersebut dapat menunjukkan bahwa UEA memiliki pasar konsumen yang cukup besar terhadap permintaan produk halal.

UEA juga merupakan negara yang menerapkan standarisasi terhadap setiap produk yang ingin masuk ke kawasannya agar dapat memiliki sertifikasi halal yang diakui oleh badan akreditasi UEA yaitu *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA). Ketatnya kebijakan negara terhadap sertifikasi halal seringkali menjadi penghambat dalam aktivitas perdagangan global yang berdampak pada tingkat ekspor produk ke negara tujuan. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan ekspor ke UEA, Indonesia melalui Komisi Akreditasi Nasional (KAN) sebelumnya telah menandatangani MoU tentang koordinasi akreditasi halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018 (Lestari, Hadiawan, & Rachmawati, 2022). Isu mengenai sertifikasi halal kemudian juga menjadi bagian dalam perjanjian IUAE CEPA, dimana kedua

negara menyepakati akan adanya saling pengakuan terhadap sertifikasi halal. Sehingga perjanjian ini dapat dikatakan sebagai optimalisasi dari kerjasama yang sebelumnya telah terjalin antara lembaga akreditasi kedua negara.

Kerjasama IUAE CEPA untuk Mencapai Akselerasi Kepentingan Ekonomi Indonesia

Kondisi perekonomian dunia dalam beberapa tahun terakhir kerap mengalami tantangan karena dipengaruhi oleh beberapa fenomena maupun ketegangan geopolitik internasional yang berdampak pada terjadinya perlambatan ekonomi global. Sebaliknya, kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan tetap tumbuh kuat ditengah gejolak perekonomian global yang tidak stabil. Salah satu penopang dari kekuatan ekonomi dalam hal ini adalah surplus neraca perdagangan luar negeri. Neraca perdagangan luar negeri Indonesia mengalami surplus dengan mencapai USD54,46 miliar pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan sebesar 50% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar USD35,42 miliar (Badan Pusat Statistik, 2023). Surplus neraca perdagangan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan total sebesar USD36,93 miliar. Neraca perdagangan yang berada pada kondisi surplus menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu bertahan dalam peningkatan resiko ekonomi dunia tersebut.

Prospek ekonomi Indonesia selanjutnya penting untuk berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks IUAE-CEPA, diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis yang diambil Indonesia untuk dapat memanfaatkan segala potensi sektor berkembang secara maksimal. Di tengah rentannya stabilitas perekonomian global yang cenderung melibatkan mitra dagang atau pasar utama Indonesia, pastinya akan turut berdampak pada resiko fluktuasi nilai perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra yang bersangkutan. Sehingga diversifikasi dalam hal ekspansi pasar ekspor menjadi sejalan dengan keputusan Indonesia menjalin kerjasama dengan UEA untuk membuka pasar potensial lainnya ke mitra dagang non tradisional.

Seiring dengan perluasan pasar tersebut, IUAE CEPA juga akan mendorong diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia. Terutama jika hal ini dikaitkan dengan komitmen ekonomi Indonesia yang sedang berusaha untuk beralih dari negara penghasil barang mentah menjadi negara penghasil barang setengah jadi atau barang bernilai tambah. Diversifikasi produk ekspor akan mendorong dan meningkatkan kinerja ekspor nasional agar dapat menghasilkan barang dengan nilai jual yang lebih tinggi dan dapat bersaing dalam pasar internasional. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam inilah yang harus menjadi salah satu fokus dan target utama Indonesia untuk mencapai peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, kerjasama IUAE CEPA akan mengakselerasi pencapaian komitmen ini dengan membuka akses pasar yang lebih baik untuk produk-produk Indonesia di pasar internasional, secara khusus dengan memanfaatkan potensi pasar yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab.

Tabel 3. Nilai Ekspor 3 Komoditi Unggulan Indonesia ke UEA

Kode HS	2021	2022	2023	Trend (%) 22-23
HS15	295,433,670	292,716,493	255,562,494	-14,5
HS71	281,252,354	363,843,201	589,277,480	62,2
HS87	175,137,707	282,095,932	382,676,585	35,4

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Dari keseluruhan komoditas ekspor utama Indonesia ke Uni Emirat Arab, produk dengan label HS71 yang mencakup logam mulia dan perhiasan/permata menjadi komoditas yang paling potensial bagi Indonesia dalam kerjasama IUAE CEPA. Pada tabel 3 ekspor perhiasan Indonesia ke UEA menunjukkan peningkatan yang paling signifikan daripada ekspor komoditas utama lain seperti minyak sawit (dibawah HS15) dan kendaraan dan bagiannya (dibawah HS87). Jika mengamati data BPS, ekspor komoditi perhiasan Indonesia ke UEA pada tahun 2021 adalah sebesar USD281 juta, kemudian mengalami peningkatan sebesar 30% pada 2022 dengan angka USD364 juta. Nilai ekspor ini terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga tahun 2023 dengan mencapai 60% atau dengan nilai USD589 juta dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup besar pada 2023 tentunya tidak lepas dari pengaruh implementasi perjanjian IUAE CEPA, yang mana kerjasama ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengakses pasar Uni Emirat Arab dengan pengurangan hambatan dalam perdagangan. UEA pada dasarnya merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama untuk komoditi perhiasan Indonesia, setelah negara Swiss, Singapura dan Hongkong (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Sehingga hal ini menjadi faktor pendorong untuk memanfaatkan industri perhiasan Indonesia agar dapat memiliki daya saing yang lebih baik di pasar UEA.

Bagi Indonesia, ekspor terhadap industri perhiasan atau logam mulia turut berkontribusi penting dalam menambah devisa negara sebagai salah satu sektor andalan. Saat ini, industri perhiasan masih termasuk komoditas potensial dalam sektor non migas Indonesia, artinya produk ini masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi komoditas utama. Hal ini dapat dilihat dari kinerja industri perhiasan Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan prospek yang positif. Seperti pada tahun 2020 saat sektor ekonomi mengalami perlambatan akibat COVID-19, peningkatan ekspor justru terjadi pada industri perhiasan Indonesia hingga mencapai 24,21% dengan nilai USD1,4 miliar dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai USD3,81 miliar di tahun 2022 (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). Oleh karena itu, industri perhiasan menjadi salah satu sektor yang harus terus dikembangkan oleh Indonesia dengan terus meningkatkan produktivitas dan akses pasarnya dalam kancah global. Secara keseluruhan, Indonesia harus dapat memanfaatkan IUAE CEPA sebagai salah satu instrument untuk mempercepat pencapaian target ekonomi Indonesia dengan mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Uni Emirat Arab melalui pengembangan pada sektor ekonomi potensial yang dimilikinya.

Perjanjian Kerjasama IUAE CEPA bagi Indonesia

Liberalisme meyakini bahwa kerjasama antar negara merupakan elemen yang penting untuk mencapai kepentingan. Setiap negara tetap membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya (autarki), yang mana hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menjalin interaksi atau kerjasama antar satu aktor internasional dengan aktor lainnya. Maksimalisasi peluang dan potensi demi peningkatan ekonomi nasional menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia, terutama ditengah gejolak perlambatan ekonomi akibat isu geopolitik internasional yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi dalam bidang ekonomi dengan sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestiknya yang besar, memerlukan sarana untuk memanfaatkan potensi yang ada demi memperoleh keuntungan pada sektor perekonomiannya.

Hubungan bilateral yang terbentuk antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menunjukkan salah satu bentuk ketergantungan (interdependensi) yang dalam pandangan ekonomi liberal tercipta dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang tercermin dari kemitraan yang dijalin Indonesia dan Uni Emirat Arab melalui IUAE CEPA, yang mana perluasan lingkup kerjasama khususnya dalam sektor ekonomi akan memberikan prospek yang lebih baik dalam mencapai stabilitas perekonomian nasional dan mengakselerasi pencapaian kepentingan masing-masing negara. Bagi Indonesia, hal ini akan dapat tercapai dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki Uni Emirat Arab, baik dalam segi potensi pasar maupun sektor unggulan komparatifnya.

Dalam konteks ekonomi, pandangan liberalisme juga cenderung mengarah pada keterkaitannya dengan regulasi perdagangan bebas. Sebagaimana Adam Smith dalam perspektif liberalisme ekonominya yang menekankan akan pentingnya perdagangan bebas, IUAE CEPA akan dapat menjadi pendorong liberalisasi perdagangan yang berdampak positif bagi Indonesia. Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia dengan UEA selalu defisit dengan angka impor migas yang lebih besar. Akan tetapi pada tahun 2023, Indonesia pada akhirnya mampu mencapai surplus perdagangan dengan Uni Emirat Arab melalui nilai ekspor non migasnya yang mampu melampaui nilai impor migas dari negara tersebut. Dengan adanya kerjasama ini membuktikan bahwa pengurangan hambatan dalam perdagangan akan membawa dampak yang positif bagi peningkatan ekspor Indonesia.

Ketercapaian surplus perdagangan dalam ekspor Indonesia ke UEA dalam hal ini menunjukkan bahwa sektor non migas Indonesia memang memiliki keunggulan komparatif dan mampu bersaing di pasar UEA. Selaras dengan konsep *comparative advantage* yang sering menjadi pokok argument dalam pasar bebas, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan produk-produk potensial yang akan diekspor untuk mencapai efisiensi produktivitas dan dapat memenangkan pasar di negara tujuan ekspornya. Pemanfaatan sektor industri perhiasan yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu komoditi unggul yang kemudian akan mampu untuk mengakselerasi pencapaian kepentingan ekonomi nasionalnya melalui IUAE-CEPA. Posisi UEA sebagai negara tujuan utama ekspor perhiasan Indonesia dengan

mempertimbangkan peningkatan ekspor komoditas ini setiap tahunnya menunjukkan bahwa pasar UEA memiliki minat yang besar terhadap sektor ini. Dalam pasar UEA sendiri, Indonesia merupakan negara pemasok perhiasan utama ke-7 (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). IUAE CEPA akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk perhiasan maupun produk lokal lainnya agar mampu bersaing dengan negara-negara kompetitor, secara khusus di target pasar non tradisional Indonesia dengan memanfaatkan potensi pasar yang dimiliki UEA.

Peningkatan ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan satu sektor juga akan turut mendorong terjadinya integrasi ekonomi lanjutan terhadap sektor lainnya, atau secara khusus disebut sebagai *spill-over effect* yang juga menjadi salah satu gagasan yang muncul dalam liberalisme. Hal ini dapat dikaitkan dengan upaya Indonesia untuk mengembangkan sektor potensial lain, seperti pengembangan industri halal. IUAE CEPA yang mencakup pengaturan khusus tentang ekonomi syariah akan mampu untuk mendorong pengembangan ekonomi islam Indonesia secara global. Sertifikasi halal menjadi salah satu isu yang difokuskan kedua negara karena seringkali menghambat sektor industri halal di negara tujuan. Di bawah IUAE CEPA, Indonesia dan UEA telah memiliki kerjasama dalam aspek pengakuan sertifikasi halal yang lebih komprehensif, sehingga akan membantu memenuhi standarisasi halal bagi produk Indonesia yang ingin memasuki pasar UEA. Hal ini akan mampu mengakselerasi target Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia melalui peningkatan ekspor dan daya saing produk halal di pasar potensial seperti UEA yang posisinya juga sebagai pusat hub perdagangan dunia sekaligus importir produk halal terbesar.

Liberalisasi ekonomi juga sejalan dengan pemikiran Smith untuk membatasi peran negara dan mendorong kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Bagi Indonesia, IUAE CEPA berperan sebagai penyedia kerangka peraturan yang akan turut mendukung kepentingan masyarakat untuk dapat bersaing di pasar bebas. Setelah implementasi IUAE CEPA, Indonesia telah mengeluarkan Permendag No 28 Tahun 2023 dan No 29 Tahun 2023 yang khusus mengatur tentang SKA (Surat Keterangan Asal) dan TRQ (*Tariff Rate Quota*) untuk memudahkan pelaku usaha Indonesia dalam mengakses pasar UEA. Dengan melakukan kerjasama ekonomi komprehensif dengan UEA, Indonesia mengambil bagian dalam intervensi pasar ekonomi untuk meregulasi dan melindungi pasar domestiknya dari dampak buruk yang bisa saja muncul dari adanya perdagangan bebas. Konsepsi perdagangan bebas jika melihat dari kacamata liberalisme berusaha untuk menggambarkan optimisme kerjasama antar aktor internasional bagi suatu negara dalam memperoleh keuntungan dalam sektor ekonomi. Kerjasama Indonesia dan UEA dapat memberikan efek yang positif untuk mengakselerasi pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia serta pengoptimalisasian perekonomian kedua negara dalam keberlanjutan hubungan kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepentingan Indonesia melalui penandatanganan IUAE-CEPA merupakan bentuk inisiasi pemerintah RI dalam menerapkan kebijakan luar negeri untuk mendorong agenda diplomasi ekonomi. Melalui penelitian ini telah menunjukkan bahwa kerjasama IUAE-CEPA memiliki prospek yang baik untuk mengakselerasi kepentingan ekonomi Indonesia dalam mencapai peningkatan perekonomian nasional melalui sektor perdagangan dan investasi maupun pemanfaatan sektor potensial. Pertama, IUAE CEPA memberikan melalui kebijakan pengurangan dan penghapusan bea tariff produk dan peningkatan volume perdagangan berdampak baik pada tercapainya surplus perdagangan Indonesia dengan UEA pasca diimplementasikan. Sektor non migas Indonesia memberikan produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif untuk bersaing di pasar UEA. Kedua, Indonesia memiliki peluang terhadap peningkatan nilai investasi asing dari UEA. Ketiga, Indonesia mampu memaksimalkan akses pasar melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke UEA untuk meningkatkan daya saing bagi produk-produk Indonesia di pasar non tradisional. Keempat, IUAE-CEPA dapat mendorong pencapaian target Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia dengan berkontribusi dalam kerjasama industri halal dengan UEA serta penguatan komitmen pada sertifikasi halal, khususnya bagi produk-produk Indonesia dalam memasuki pasar UEA. IUAE CEPA menjadi refleksi dari hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam mencapai kepentingan dalam bidang ekonomi. Sehingga Indonesia sendiri turut memanfaatkan segala peluang yang ditawarkan melalui adanya perjanjian komprehensif ini untuk mendorong sektor usaha dalam negeri dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

Saran

Untuk memaksimalkan penerapan kerjasama ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan sosialisasi lebih luas mengenai mekanisme maupun manfaat IUAE-CEPA kepada para pelaku usaha lokal agar dapat lebih memanfaatkan kebijakan yang ada demi mendorong tingkat ekspor dan diversifikasi produk ke pasar UEA dan sekitarnya. Pemberlakuan monitoring serta evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan agar kerjasama ini terus memberikan keuntungan yang maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dengan kekurangan dan keterbatasan dalam cakupan penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat berusaha untuk meninjau lebih jauh efektivitas dari perjanjian IUAE-CEPA bagi perekonomian Indonesia setelah diterapkan dalam jangka waktu yang lebih lama, terlebih untuk menganalisis implementasinya terhadap produk-produk unggulan tertentu yang dimiliki Indonesia dalam persaingan pasar di UEA.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Buku

- Abbott, K. W., & Duncan, S. (2004). Pathways to International Cooperation. In *The Impact of International Law on International Cooperation* (p. 71). Cambridge University Press.
- Asia House. (2022). *THE MIDDLE EAST PIVOT TO ASIA 2022 | Continued growth in Uncertain Times*.
- Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. (2021). *RENCANA STRATEGIS BPPK/BSKLN 2020-2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2023*.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/21/a62efbad86d18bc35581c33a/laporan-perekonomian-indonesia-2023.html>
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory* (1st ed.). PALGRAVE MACMILLAN.
- Bastian, U. A. (n.d.). Pengaruh Perdagangan Bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. In *Jurnal Muamalat Indonesia-Mei 2022* (Vol. 21, Issue 1). <https://data.worldbank.org/>
- Dinar Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*.
<https://www.dinarstandard.com>
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- JENSEN, S. (2017). Indonesia-UAE Relations in the Context of Regional Governance. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 11(4), 100–111.
<https://doi.org/10.1080/25765949.2017.12023320>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. (2019). *Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019 - 2024*.
- Khaeruddin, K., & Hidayat, S. (2020). Uni Emirat Arab: Kuasa Ekonomi di Timur Tengah (2002-2018). *CHRONOLOGIA*, 2(2), 1–11.
<https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.5891>
- Lestari, S. I., Hadiawan, A., & Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN Tahun 2018. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531>
- Minhajuddin. (2023). *Kepentingan Uni Emirat Arab Dalam Kerja Sama Ekonomi Dengan Indonesia (IUAE-CEPA): Telaah Konstruktivisme*. 3.
- Mustofa, A. Z. (2021). Analisis Kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) Dalam Bidang Pertahanan (2019-2021). *Jurnal Politik Dan Sosisal Kemasyarakatan*, 13(2).

- Nurhafizhah, R., & Hirawan, F. B. (2021). *Prospects and Challenges of Indonesian Exports to Non-Traditional Market: Measuring The Competitiveness of Indonesian Products in UEA Market* (Vol. 12).
- Purnama, Y. (2022). *STRATEGI SOFT POWER UNI EMIRAT ARAB DALAM KERJA SAMA DENGAN INDONESIA TAHUN 2015 - 2022*.
- Sari, I. T. (2017). *Hubungan Kerjasama Antara Negara Bagian Queensland dengan Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved from <http://repository.ums.ac.id/handle/123456789/12122>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Vol. 1). Literasi Media Publishing.
- Steans, J., Pettiford, L., Diez, T., & El-anis, I. (2010). *An Introduction to International Relations Theory* (3rd ed.). Pearson Education Limited.
www.pearsoned.co.uk
- Wahyudi, Y., & Sasongko, G. (2021). Perdagangan Bilateral Indonesia-Persatuan Emirat Arab (PEA): Pendekatan Intensitas. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 9.
- Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). *Teori Pembangunan Internasional*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Media Online

- CNBC Indonesia. (2019). *Wapres: RI Hanya Konsumen & Tukang Stempel Produk Halal Impor*. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20191213134350-29-122870/wapres-ri-hanya-konsumen-tukang-stempel-produk-halal-impor>
- CNN Indonesia. (2021). *Bahlil soal Investasi UEA di RI Tembus Rp636 T: Bukan Kaleng Krupuk*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211111125104-532-719704/bahlil-soal-investasi-uea-di-ri-tembus-rp636-t-bukan-kaleng-krupuk>
- Ditjen PPI. (2022). *Perundingan Indonesia-UAE CEPA Capai Kesepakatan Substansi*. Retrieved from <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/perundingan-indonesia-uae-cepa-capai-kesepakatan-substansi>
- Indonesia's Economic Strategic Position in ASEAN – CAPRS*. (n.d.). Retrieved from <https://www.lspr.edu/caprs/index.php/2023/05/31/indonesias-economic-strategic-position-in-asean/>
- Kemendag RI. (2023). *Inilah Negara Penyumbang Surplus dan Defisit Neraca Perdagangan Indonesia*. [Kemendag.go.id
https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/inilah-negara-penyumbang-surplus-dan-defisit-neraca-perdagangan-indonesia](https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/inilah-negara-penyumbang-surplus-dan-defisit-neraca-perdagangan-indonesia)
- Kemendag RI. (2023). *Investasi PMA | Satu data Perdagangan*. [Satudata.kemendag.go.id
https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/investasi-pma](https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/investasi-pma)

- Kemendag RI. (2023). *Perkembangan Ekspor Non Migas (Sektor) | Satu Data Perdagangan*. <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-sektor>.
- Kemendag RI. (2023). *Permendag Nomor 28 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 29 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Manfaatkan IUAE-CEPA melalui SKA dan Tariff Rate Quota*. [Kemendag.go.id. Retrieved from https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-permendag-nomor-28-tahun-2023-dan-permendag-nomor-29-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan-manfaatkan-iuae-cepa-melalui-ska-dan-tariff-rate-quota](https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-permendag-nomor-28-tahun-2023-dan-permendag-nomor-29-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan-manfaatkan-iuae-cepa-melalui-ska-dan-tariff-rate-quota)
- Kementerian Perdagangan. (n.d). *Indonesia – Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)*. Retrieved from <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Indonesia’s Jewellery Industry Continues to Perform Brilliantly*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/penang/en/news/11646/indonesias-jewellery-industry-continues-to-perform-brilliantly>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Sekilas Hubungan Ekonomi dari Indonesia ke Dubai*. [Kemlu.go.id. Retrieved from https://kemlu.go.id/dubai/id/read/sekilas-hubungan-ekonomi-dari-indonesia-ke-dubai/1508/etc-menu](https://kemlu.go.id/dubai/id/read/sekilas-hubungan-ekonomi-dari-indonesia-ke-dubai/1508/etc-menu)
- Menpan RI. (2024). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Realisasi Investasi 2023 Capai Rp1.418,9 Triliun*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/realisasi-investasi-2023-capai-rp1-418-9-triliun>
- Setkab RI. (2021). *IUAE-CEPA Sejarah Baru Perundingan Dagang Indonesia dengan Negara Kawasan Teluk*. Retrieved from <https://setkab.go.id/iuae-cepa-sejarah-baru-perundingan-dagang-indonesia-dengan-negara-kawasan-teluk/>
- World Bank. (2022). GDP per capita (current US\$) - Indonesia. [Data.Worldbank.Org. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID&name_desc=false](https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID&name_desc=false)